



KECAMATAN DONGKO

RENJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. rencana kerja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan sehingga Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.
- (3) Renja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RKPD Tahun 2025; dan
 - b. Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. bab III mengenai tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV mengenai rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. bab V mengenai penutup.

(2) Dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- q. Dinas Perikanan;
- r. Dinas Peternakan;
- s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- w. Badan Keuangan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian Daerah;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Trenggalek;

- aa. Kecamatan Panggul;
- bb. Kecamatan Suruh;
- cc. Kecamatan Durenan;
- dd. Kecamatan Pogalan;
- ee. Kecamatan Dongko;
- ff. Kecamatan Kampak;
- gg. Kecamatan Munjungan;
- hh. Kecamatan Pule;
- ii. Kecamatan Gandusari;
- jj. Kecamatan Bendungan;
- kk. Kecamatan Karanganyar; dan
- ll. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan berpedoman pada:
 - a. perubahan RKPD Tahun 2025; dan
 - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juli 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223199203 2 004

**LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

RENJA KECAMATAN DONGKO TAHUN 2025

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat daerah harus menyusun Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Semua Perangkat daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta anggaran/pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tersusunnya RKPD Kabupaten Trenggalek ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Dokumen RKPD disusun melalui pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD/Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh

semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2025 secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

- a) Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- c) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024
- d) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi Ranperda tentang APBD;
- e) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- f) Menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan sedangkan untuk perangkat daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2025. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Prioritas program pelaksanaan Kecamatan Dongko, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

I.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RENJA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 16 Desember 2021, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 86;
31. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Dongko tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Dongko dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Dongko tahun 2025 bertujuan :

1. Sebagai acuan Kecamatan Dongko dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek selama tahun 2025.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Dongko.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi **latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan**, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DONGKO TAHUN LALU

Pada Bab ini menjelaskan, antara lain :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dongko Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dongko**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dongko**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dongko, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Darah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Darah (PD), Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Darah (PD), dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,
dibagian ini menjelaskan bahwa Renja harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dongko.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,
dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Darah (PD) dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Darah (PD).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dongko, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Darah (PD) yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Darah (PD).

- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. HASIL EVALUASI RENJA PD KECAMATAN DONGKO TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN DONGKO

Rencana Kerja Kecamatan Dongko adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Dongko. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Dongko merupakan Akuntabilitas Pemerintah dan sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Laporan Kinerja Kecamatan Dongko merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dongko ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Dongko selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Kecamatan Dongko pada tahun anggaran 2023 dilakukan pada 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

C. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sasaran Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Dongko dibiayai dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 2.280.095.988** (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

Tabel 2.1
Rincian dan Realisasi Anggaran
pada Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 1 Tahun	Realisasi	%
KECAMATAN DONGKO	2.280.095.988	2.149.853.565	94,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.196.022.548	2.072.542.065	94,38
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.858.850	5.645.670	96,36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.949.770	3.748.170	94,9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.909.080	3.748.170	99,39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.967.343.317	1.854.870.938.	94,28
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.879.898.688	1.771.291.188	94,22
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.080.000	80.300.000	95,51
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.755.690	1.723.000	98,13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulan/ Semesteran SKPD	1.608.939	1.556.750	96,76
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	637.000	550.000	86,34

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 1 Tahun	Realisasi	%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (KECAMATAN DONGKO)	637.000	550.000	86,34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	725.000	698.000	95,49
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000	480.000	96,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.000	218.000	96,89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.470.937	88.298.645	95,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.648.000	2.639.550	99,68
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.529.037	17.492.505	99,79
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.126.300	20.035.000	99,55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.050.000	8.001.590	99,40
Penyediaan Bahan/Material	3.377.600	3.248.000	96,16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.740.000	40.572.000	99,59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.008.000	32.096.500	97,24
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.008.000	32.096.500	97,24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.381.644	64.192.412	93,87
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.581.644	17.392.412	80,59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.800.000	46.800.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.597.800	22.499.900	81,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.281.800	13.565.000	74,20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.029.200	5.123.500	94,59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.286.800	5.123.500	96,91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 1 Tahun	Realisasi	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.155.815	49.538.000	94,98
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.236.314	13.200.000	99,73
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.236.314	13.200.000	99,73
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	38.919.501	36.338.000	93,37
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.943.256	8.020.000	80,66
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	28.976.245	28.318.000	97,73
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.179.525	3.625.000	69,99
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.179.525	3.625.000	69,99
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.179.525	3.625.000	69,99
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.979.050	13.606.000	85,15
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.979.050	13.606.000	85,15
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.669.050	7.531.000	86,87
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.310.000	6.075.000	83,11
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.759.050	10.534.000	97,91
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.759.050	10.534.000	97,91
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.879.525	5.817.000	98,94
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.879.525	4.717.000	96,67

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Output
pada Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi %
KECAMATAN DONGKO			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen	14 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	46 Laporan	46 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100 %	100 %
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	36 Dokumen	36 Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	371 Dokumen	371 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	38 Laporan	38 Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (KECAMATAN DONGKO)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	27 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	50 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	1 Orang	15 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	4 Paket	4 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	4 Paket	4 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	4 Paket	4 Paket
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	5 Paket	5 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	12 Laporan	12 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 unit	3 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa Komunikasi dan daya listrik kantor yang dicukupi	24 Laporan	24 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Laporan	13 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya	8 unit	8 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya	8 unit	8 unit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilaksanakan	2 unit	2 unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 Laporan	2 Laporan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Pada Camat yang disusun	24 Dokumen	24 Dokumen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil pemberdayaan desa yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	12 dokumen	12 dokumen
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi %
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	3 Laporan	3 Laporan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan desa	12 Dokumen	12 Dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun yang berjalan yakni Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Indikatif Kecamatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Anggaran tersedia sebesar Rp. 2.280.095.988,- yang terdiri 5 program, 13 kegiatan, 29 sub kegiatan.

Diharapkan keberhasilan kinerja bisa mencapai 97% atau minimal sama dengan Pencapaian pada Tahun Anggaran 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga perlu dilakukan prioritas dalam

pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan teknis yang berkelanjutan terhadap sumber daya manusia.

2. Belum optimalnya implementasi Keputusan Bupati, Nomor 137 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dan Bupati kepada Camat.
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
4. Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra maupun RKPD dalam merencanakan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishing*) dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat pelayanan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan Pelayanan Prima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat.
 - c. Mewujudkan program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi pemberdayaan segala potensi yang ada di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan : meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.
4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penilaian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek dan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam melayani masyarakat.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN DONGKO

a. Tugas Kecamatan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, tugas Kecamatan adalah :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan;

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraa ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

b. Fungsi Kecamatan

Adapun fungsi dari Kecamatan adalah :

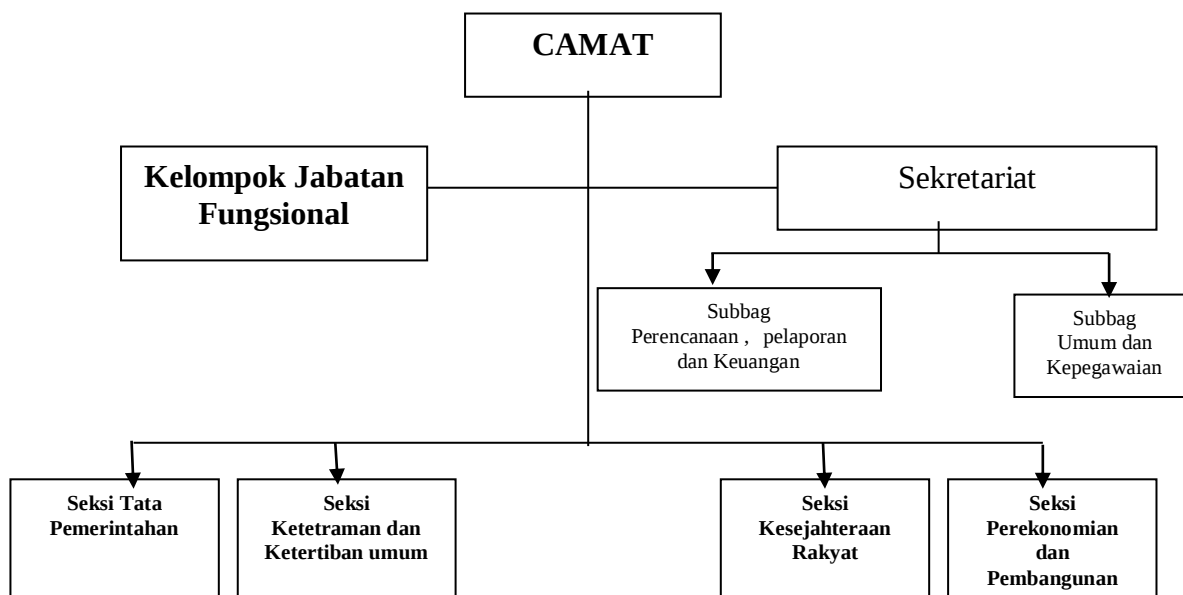
- a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian operasional program-program Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan;
- d. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. penyelenggaraan pelayanan umum;
- i. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. STRUKTUR ORGANISASI.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tersebut memberikan gambaran bahwa Susunan Organisasi Kecamatan Dongko terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag umum dan kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Perekonomi dan Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun susunan kepegawaian Kecamatan Dongko adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan	Umur	Pendi dikan
1.	ARIYANTI PUJIASTUTIE, S.STP	Pembina Tk.I, IV/a	Camat	47	Sarjana
2.	REZHA SATRIA, S.STP	Penata, III/c	Plt. Sekcam	35	Sarjana
3.	HERU JATMIKO,SE	Penata Tk.I. III/d	Kasi Trantibum	53	Sarjana
4.	SATRIA IMADUDDIN, S.AB, M.Si	Penata, III/d	Kasi Tapem	38	Sarjana
5.	REZA RAMADIANO BRILLIANTA,S.Sos	Penata, III/c	Kasi Kesra	38	Sarjana
6.	SURYONO, S.Sos	Penata Tk.I, III/d	Kasi Ekbang	55	Sarjana
7.	SUDIANTO, S.Sos	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	52	Sarjana
8.	SURATMI, S.Sos	Pengatur Tk.I, II/d	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	53	Sarjana
9.	SUDARSONO	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara	47	SLTA
10.	PURNOMO	Pengatur, II/d	Pengelola Administrasi Pemerintahan	43	SLTA
11.	AGUS SUJOKO, S.Sos	Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Bahan Perencanaan	41	SLTA
12.	SURATMI, S.Sos	Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Keuangan	53	Sarjana
13.	EKO BUDI SETIAWAN	Pengatur, II/d	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	41	SLTA
14.	KENTOT SUPRIYANTO	Pengatur, II/d	Pengelola Kepegawaian	51	SLTA
15.	SUKAMDI	Pengatur, II/d	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	45	SLTA
16.	EDY WAHONO	Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Data Kesejahteraan rakyat	48	SLTA

Sumber Daya Perangkat Daerah

Aparatur Kecamatan

Adapun Aparatur yang ada di kantor Kecamatan Dongko sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Dongko personil berjumlah : 15 orang
2. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, personil berjumlah : 2 orang
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, personil sejumlah : 1 orang
4. Mantri Statistik Kecamatan, dengan personil sejumlah : 1 orang
5. Mantri Peternakan personil berjumlah : 1 orang
6. Mantri Pertanian personil berjumlah : 3 orang
7. UPD Dinas Pendapatan, personil berjumlah : 2 orang

Latar belakang pendidikan personil Kecamatan sebagai berikut:

Sarjana S2 berjumlah : 1 Orang
Sarjana S1 berjumlah : 8 Orang
SLTA : 6 Orang
SLTP : - Orang
SD : - Orang

Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan 4 (empat) pendekatan, yaitu : pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plan*.

Keterpaduan perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Dongko yang membantu Bupati Trenggalek dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur melalui perubahan mind set dan cultur set sangat menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Dongko meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat teknis dan fungsional ;
- b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c) Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d) Meningkatnya koordinasi perencanaan *intern* yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion (FGD)*;
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Dongko dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Seringnya perubahan peraturan perencanaan dan kebijakan yang berpengaruh terhadap proses dan hasil perencanaan ;
2. Belum adanya pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati kepada Camat;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan di Kecamatan;
4. Adanya persepsi masyarakat bahwa Musrenbang hanya program formalitas;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah; rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan ;
7. Internal Kecamatan Dongko belum mampu menyediakan *standard operating procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DONGKO

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat / fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian di bidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Trenggalek dan strategis untuk

meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.

3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan penyimpangan terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan IT dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan bagian periodisasi tahap kelima RPJP Kabupaten Trenggalek dinyatakan bahwa: “Pembangunan tahap kelima diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian yang berbasis, agrobisnis/agroindustri tersebut pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai”.

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang berbasis pada tema Pembangunan nasional tahun 2025, yaitu **“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS AGRIBISNIS DAN AGRO INDUSTRI YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN SERTA PENGUATAN DAYA SAING DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK”**.

Adapun Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut : **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERDAYA SAING ”**

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 didukung dan dilaksanakan melalui 3 (Tiga) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian berbasis agribisnis dan agroindustri.
2. Pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berwawasan lingkungan.
3. Peningkatan daya saing daerah dan pelayanan publik.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek didiskusikan dalam pembahasan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil MUSRENBANG dan MUSRENA KEREN di kecamatan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, maka Kecamatan Dongko akan menginventarisir program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, desa desa yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari tinjauan lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Setelah melalui berbagai mekanisme diskusi dan pembahasan maka Rancangan Rencana Kerja yang telah disetujui akan ditetapkan menjadi Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Dongko Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Mengacu pada “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2021 – 2026 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju,”

Sebagaimana dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2021 - 2026, dalam periode tahun 2021 -2026, dengan berbagai upaya yang dilakukan, dengan Tema **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERDAYA SAING ”**

Sebagai RKP kelima dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026, RKP 2025 memiliki tiga fokus. *Pertama*, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian berbasis agribisnis dan agroindustry,

Kedua, Pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berwawasan lingkungan,.

Ketiga Peningkatan daya saing daerah dan pelayanan publik. Arah kebijakan pembangunan 2025 juga memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026, yaitu Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustry yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta penguatan daya saing daerah dan pelayanan publik.

Dari Prioritas Nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan tema RKP 2025. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2025, dilakukan penekanan pada tiga Prioritas Nasional yakni:

Pertama Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian berbasis agribisnis dan agro industry.

Kedua, Pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berwawasan lingkungan.

Ketiga, Peningkatan daya saing daerah dan pelayanan publik.

Sedangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026, dengan tema awal tahun 2025 **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERDAYA SAING ”**

sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan visi dan misinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN DONGKO

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 272 ayat (2), mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dongko Tahun 2025 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, yaitu :

Misi ke-3 (RKPD)

Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)

Tujuan (RKPD)

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data

Sasaran Pembangunan Daerah (RKPD)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten, profesional, kreatif dan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dan menunjang pelayanan publik yang prima

Adapun Tujuan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional

2. Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data

Sedangkan untuk Sasaran Strategis Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, meliputi :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya layanan publik dan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan secara kolaboratif

Adapun penjabaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RKPD dan Renja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra
Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

Visi / Misi	Tujuan Pembangunan Daerah	Tujuan Strategis Perangkat Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah
Visi : "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)"	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional 2. Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten, profesional, kreatif dan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dan menunjang pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2. Meningkatnya layanan publik dan koordinasi

Visi / Misi	Tujuan Pembangunan Daerah	Tujuan Strategis Perangkat Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah
Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”				pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan secara kolaboratif

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMEN) ”**

maka rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Indikatif Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah 5 Program, 13 Kegiatan, 32 Sub Kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, pada tahun 2025 Kecamatan Dongko akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku, Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (mapping terhadap nomenklatur program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana di atur dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan RPJMN 2021-2026 adalah 5 Program, 13 Kegiatan, 32 Sub Kegiatan.

Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja kecamatan Dongko Tahun 2025 adalah :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan/Material
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dongko 2025, sebagai penjabaran rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2021-2026. Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2025 memuat program dan kegiatan pelaksanaan program Kecamatan Dongko yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pendanaan indikatif Kecamatan Dongko tahun 2025 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DONGKO KAB. TRENGGALEK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN DONGKO						2.303.489.044							2.863.294.250	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.303.489.044							2.863.294.250	
	7.01	KECAMATAN						2.303.489.044							2.863.294.250	
1	7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi;Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;Persentase nilai aset dalam kondisi baik	-			100;100;100%;%;%	2.201.881.444						-	2.680.309.250	
	7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			12 dokumen	13.174.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan	-	45.104.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Doku men	9.719.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		30.050.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD				46 Lapor an	3.455.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		15.054.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerahyang di selesaikan	-			100 %	2.012.314.161			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan	-	2.160.494.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang /bulan	1.933.860.161	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		2.040.964.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	75.080.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		109.530.000	KECAMATAN DONGKO	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				371 Dokumen	1.100.000	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		5.000.000	KECAMATAN DONGKO
7	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2.274.000	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		5.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			100 %	637.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan	-	32.004.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	637.000	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang	Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan		32.004.750	KECAMATAN DONGKO

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Melayani				
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			100 %	10.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan	-	13.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	9.000.000	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		10.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	1.000.000	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		3.000.000	KECAMATAN DONGKO

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	-			100 %	63.454.733			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan	-	167.438.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	9.000.000	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAERAH AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		10.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	1.000.000	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAERAH AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		3.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	-			100 %	63.454.733			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang	Aparatur Kecamatan	-	167.438.750	KECAMATAN DONGKO

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Melayani				
	7.01.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.648.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		10.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	23.685.500	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		35.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan				2 Paket	767.150	Kab. Trenggal ek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des aKab. Trenggal ek,	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		22.992.000	KECAMATAN DONGKO

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Dongko, Semua Kel/Des a		nyeludupan					
	7.01.01. 2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan				4 Paket	10.989.483	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		19.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/ Materialyang Disediakan				4 Paket	3.377.600	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		14.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD				12 Lapor an	21.262.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		56.446.750	KECAMATAN DONGKO

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											nyeludupan					
	7.01.01. 2.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Doku men	725.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		10.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	-			100 %	19.810.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan	-	73.704.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.07.000 5	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10.180.000	Kab. Trenggal ek, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des aKab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan		43.704.750	KECAMATAN DONGKO

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a							
	7.01.01. 2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	9.630.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaran pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan		30.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang di selesaikan	-			100 %	41.551.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaran pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan	-	99.856.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	19.051.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaran pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		35.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.08.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3															
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4.500.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		10.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	18.000.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan		54.856.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			100 %	40.940.550			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan	-	88.704.750	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01. 2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	31.624.550	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penye ludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan		48.400.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	4.029.200	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penye ludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan		15.000.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.286.800	Kab. Trenggal ek, Dongko, Dongko	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penye ludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan		25.304.750	KECAMATAN DONGKO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA NPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	-			100 %	42.508.600						-	102.300.000	

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	-			6 doku men	19.546.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen ceghahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan ,Aparatur Pemerinta han Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyaraka t Dongko	-	37.650.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.02. 2.01.000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Lapor an	19.546.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen ceghahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan ,Aparatur Pemerinta han Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyaraka t Dongko		37.650.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camatyang disusun	-			12 doku men	22.962.600			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen ceghahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan dan Aparatur Pemerinta han Desa	-	64.650.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.02. 2.04.000 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan				12 Lapor an	22.962.600	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen ceghahan dan Pemberantasan Korupsi,	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang	Aparatur Kecamatan dan Aparatur Pemerinta han Desa		64.650.000	KECAMATAN DONGKO

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										M	Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Melayani				
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	-			100 %	9.760.000							19.965.000	
	7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah laporan hasil pemberdayaan desa yangdisusun	-			2 Doku men	9.760.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan ,Aparatur Pemerinta han Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyaraka t Dongko	-	19.965.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.03. 2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Lapor an	9.760.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan ,Aparatur Pemerinta han Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyaraka t Dongko		19.965.000	KECAMATAN DONGKO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yangditindaklanjuti	-			100 %	29.419.000							37.290.000	

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum yang disusun	-			15 dokumen	29.419.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan ,Aparatur Pemerintahan Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarakat Dongko	-	37.290.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.109.000	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan ,Aparatur Pemerintahan Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarakat Dongko		28.445.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	7.310.000	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan ,Aparatur Pemerintahan Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarakat Dongko		8.845.000	KECAMATAN DONGKO

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dante pat waktu	-			100 %	19.920.000							23.430.000	
	7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa yang dilaksanakan	-			24 Doku men	19.920.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan dan Aparatur Pemerinta han Desa	-	23.430.000	KECAMATAN DONGKO
	7.01.06. 2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Doku men	10.460.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Aparatur Kecamatan dan Aparatur Pemerinta han Desa		10.373.200	KECAMATAN DONGKO
	7.01.06. 2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa				12 Doku men	9.460.000	Kab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola	Aparatur Kecamatan dan Aparatur Pemerinta han Desa		13.056.800	KECAMATAN DONGKO

**Renja Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										UMUM	Korupsi, Narkoba, Judi dan Penye- lu- dupan	Birokrasi yang Melayani				
	JUMLAH							2.303.489.044							2.863.294.250	

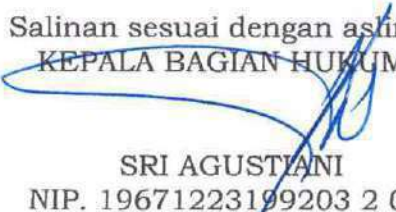
BAB V PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholder*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Kecamatan Dongko adalah Program Tahunan Kecamatan Dongko yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan sasaran Program pada Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Renja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Dongko. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Dongko. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Dongko sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN



JL. KH. Wakhid Hasyim No.5, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek
+62 355 791121
bappedalitbang.trenggalekkab.go.id/
litbangtrenggalek@gmail.com

